

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

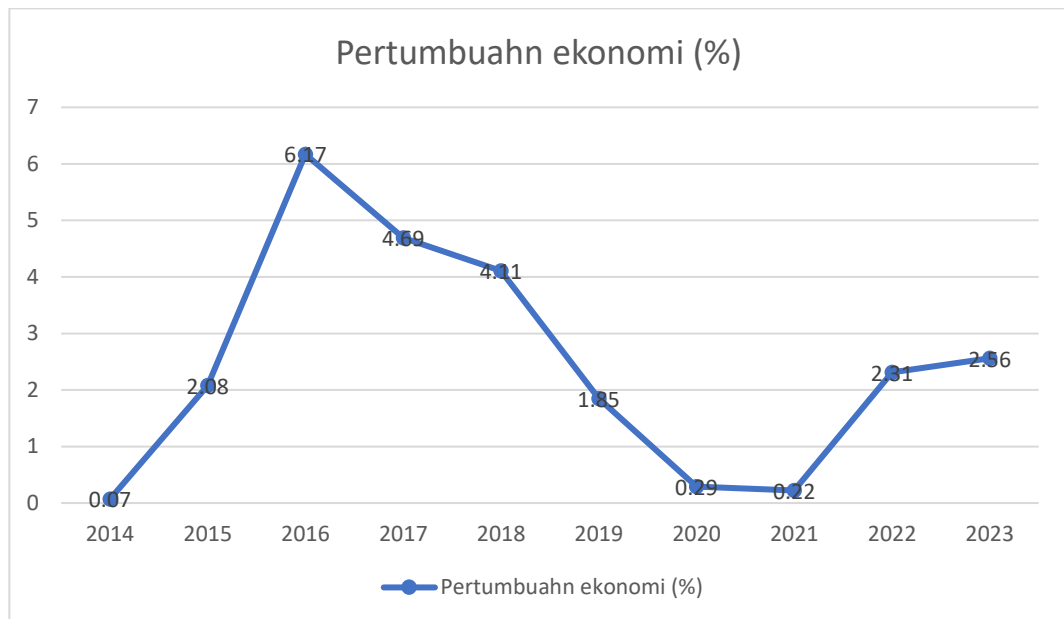
Pelaksanaan pembangunan terutama dalam bidang ekonomi di suatu daerah memiliki tujuan untuk mengetahui potensi yang ada guna memanfaatkannya sebagai pemenuhan kebutuhan di daerahnya. Kegiatan dalam pembangunan ekonomi digunakan sebagai usaha pemerintah dalam melakukan perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan taraf kehidupan, pemerataan dalam pendapatan Masyarakat, mempererat hubungan ekonomi secara regional serta sebagai proses dari pergeseran pola ekonomi yang masih mengandalkan sektor primer kepada sektor sekunder bahkan tersier.

Pertumbuhan ekonomi menjadi masalah yang bersifat jangka panjang dalam suatu pembangunan terutama pada daerah. Menurut Boediono dalam (Asmara 2024) Tolak ukur suatu negara telah berhasil menciptakan Masyarakat yang sejahtera berdasarkan pertumbuhan ekonominya. Dengan kata lain, tolak ukur yang berasal dari pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dilihat dari kemampuannya dalam melakukan produksi barang dan jasa. Faktor produksi adalah salah satu faktor krusial dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, naik atau turunnya produksi memiliki dampak yang besar pada Tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Terdapat beberapa unsur yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi dalam proses pertumbuhan ekonomi diantaranya pengaruh kekayaan alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, pembagian kerja, dan ukuran produksi. Sedangkan masalah-masalah yang termasuk dalam non

ekonomi seperti adanya masalah politik, sosial, dan administrasi menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor pemerintah menjadi sektor yang paling berpengaruh dalam proses pertumbuhan ekonomi menurut Sejarah yang terjadi. Sehingga peran pemerintah sebagai penentu kebijakan fiskal dengan tujuan utamanya dari pembangunan yang direncanakan yakni dengan menurunkan intensitas dari pengangguran, inflasi yang dapat terkendali, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Instrumen utama pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal terbagi menjadi dua yakni perpajakan dan pengeluaran.

Instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang dapat dimanfaatkan guna mendorong kegiatan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berasal dari pengeluaran. Optimalisasi peran pemerintah dalam instrumen pengeluaran ditunjukkan dengan peningkatan pengeluaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Peran pemerintah dalam upaya peningkatan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara riil juga meningkatkan pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menjadi tolak ukur adanya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi.

Grafik 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sampang Periode 2014-2023



Sumber: BPS Kabupaten Sampang

Dari data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang, terjadi fluktuasi pada tiap tahunnya. Tahun 2017, terjadi pertumbuhan ekonomi paling tinggi yakni sebesar 4,69%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi paling rendah terjadi ditahun 2014 dan 2021 angka menunjukkan 0,07 % dan 0,22%. Penurunan yang terjadi pada tahun 2021 disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 sehingga pertumbuhan ekonomi juga mengalami imbasnya secara global. Tren positif terjadi di tahun 2022 dan 2023 dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat kembali pulih dan mengalami kenaikan sebesar 2,31% dan 2,56%. Pemulihan terjadi sebagai proses percepatan kembali perekonomian oleh pemerintah pusat dengan berbagai upaya dan program dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang pulih. Pada tahun 2023, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi yakni

Jasa Perusahaan sebesar 13,72 dan Transportasi dan Pergudangan 12,08 persen.

Kebijakan otonomi daerah diberlakukan sebagai upaya dalam mengatasi setiap masalah pada pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagaimana yang disampaikan pada Undang-undang No 22 tahun 1999 perihal asas desentralisasi menyebutkan tentang otonomi daerah yang merupakan adalah dan kekuasaan pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk mengatur serta mengelola segala kepentingan rakyat berdasarkan peraturan yang telah berlaku di daerah tersebut. Pemberlakuan otonomi daerah dimaksudkan agar suatu daerah dapat mengurangi tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat dalam artian menjadi daerah yang mandiri dengan terus berupaya mendorong dan menggali sektor unggulan yang dapat menunjang pendapatan dan daya saing sehingga kekuatan fiskal semakin meningkat. Potensi-potensi sumber daya yang digali untuk kepentingan dalam menunjang kekuatan keuangan daerah menjadi tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya pemerintah pusat. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat meminimalisir penerimaan dana dari pemerintah pusat sehingga kemandirian sumber keuangan yang berpusat dari pemerintah daerah dapat terealisasi. Meski demikian, dengan diselenggarakannya otonomi daerah dapat menjadi sebuah tantangan dan tanggung jawab bagi pemerintahan daerah guna dapat meningkatkan pelayanan public, sarana prasarana, infrastruktur yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat secara demokratis, berkeadilan, dan bersifat berkelanjutan.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yang membahas tentang pendapatan daerah mengatakan bahwa sumber pendapatan daerah dapat dimasukkan kedalam nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran yang berlaku dan menjadi hal yang dimiliki oleh daerah. Sehingga kewenangan dalam otonomi daerah digunakan untuk mengoptimalkan peningkatan ekonomi di daerahnya dengan pendapatan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Mudrajat Kuncoro dalam (Al-Khawarizmi, Marseto & Sishadiyati 2021) pembangunan ekonomi pada suatu daerah adalah salah satu langkah penting yang menjadi prioritas pemerintah daerah dan semua masyarakat ikut serta dalam proses mengelola hingga memaksimalkan penggunaan potensi sumber daya yang ada dengan membuat kerjasama guna menghasilkan perkembangan ekonomi dengan membuka lapangan pekerjaan baru.

Implementasi desentralisasi fiskal yang tepat pada suatu daerah tergambar dalam bagaimana kinerja pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya. Penyelenggaraan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), sehingga hal ini juga sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah Dimana APBD memegang peran penting untuk memenuhi rencana dan anggaran Pembangunan yang sedang direncanakan oleh pemerintah daerah terutama dalam meningkatkan fasilitas dan pelayanan kepada Masyarakat. Terdapat tiga komponen yang menjadi indikator dalam APBD yakni pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijadikan tolak ukur suatu daerah untuk melihat tingkat kemandiriannya. Pendapatan Asli Daerah berasal dari retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan juga berasal dari sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Aturan dalam penentuan jumlah pajak dan retribusi daerah selalu berbeda menyesuaikan aturan dari daerah tersebut. PAD diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur dan kualitas publik sebagai salah satu indikator dalam memicu pertumbuhan ekonomi. Penyedia dana bagi pelaksanaan otonomi daerah.

Grafik 1. 2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sampang Periode 2014-2023



Sumber: DPJK Kemenkeu (data diolah)

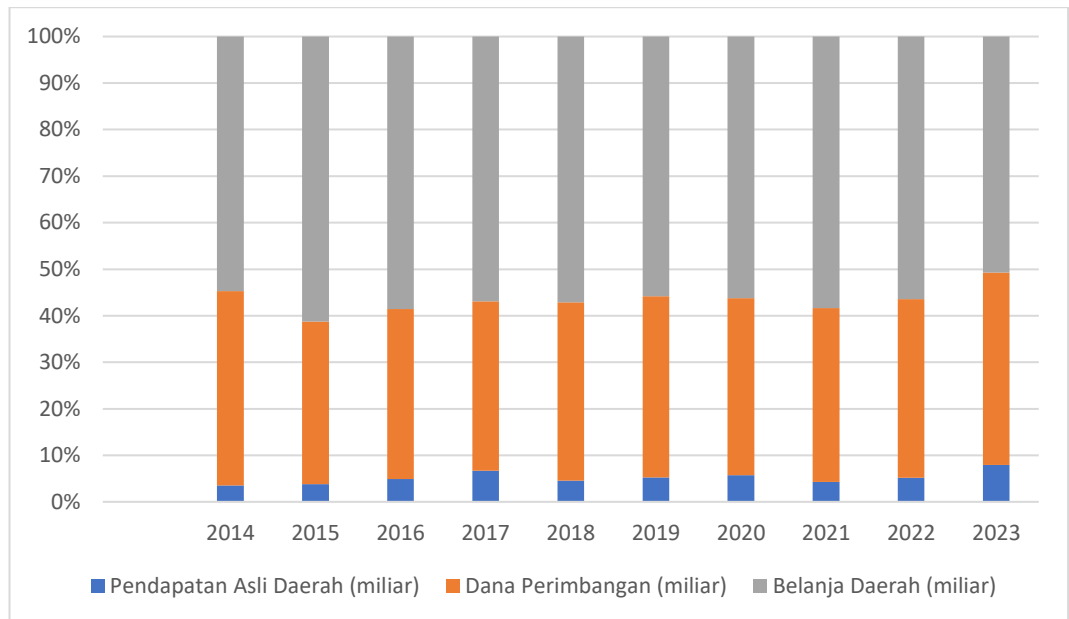
Pada gambar 1.2 memperlihatkan perkembangan dari Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Sampang tahun 2014-2023. Dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sampang mengalami fluktuasi yang

terjadi dari tahun 2014 sampai 2021 hingga akhirnya peningkatan secara terjadi tahun 2022 dan 2023. Sedangkan tahun 2014 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sampang sebesar 77,67 miliar. Kenaikan signifikan terjadi di tahun 2023 yakni sebesar 333,38 sekaligus menjadi PAD tertinggi.

Dalam memenuhi pengeluaran selain bergantung pada Pendapatan Asli Daerah, maka perlunya bantuan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah guna menciptakan keseimbangan dan kesetaraan pada keuangan daerahnya serta menunjang kebutuhan daerah, dana ini disebut sebagai dana perimbangan. Sehingga, Dana perimbangan adalah implementasi desentralisasi fiskal yang berdampak langsung dengan kemandirian daerah.

Dana Perimbangan dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 dibagi menjadi tiga sumber yakni, Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk penyetaraan dalam keuangan daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk memberikannya pada proyek tertentu sesuai dengan kebutuhan daerahnya, Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari penerimaan pajak dan sumber daya alam.

Grafik 1. 3 Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sampang Periode 2014-2023



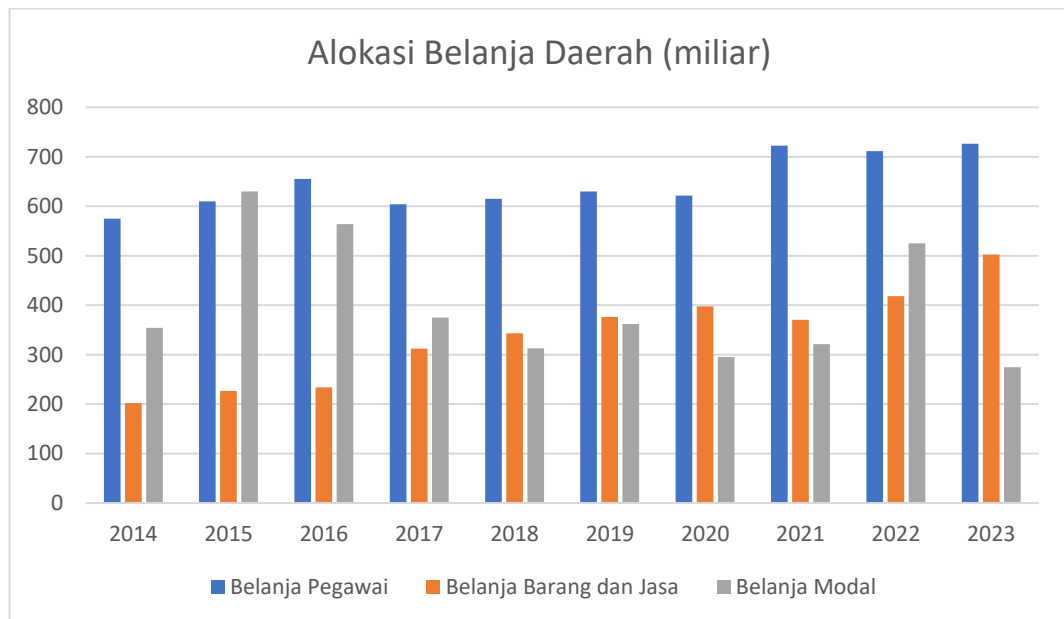
Sumber: Pemerintah Kabupaten Sampang (data diolah)

Kabupaten Sampang masih memiliki masalah dan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Berdasarkan analisis grafik tren Dana perimbangan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah. Namun, dana perimbangan masih menjadi sumber penyumbang pendapatan daerah dengan nilai yang terus meningkat dari Rp 925.899.723.252,00 miliar di tahun 2014 menjadi Rp 1.671.997.790.661,00 miliar pada tahun 2023. Besarnya kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah yang mencapai lebih dari 80% setiap tahun. Hal ini justru berkebalikan dengan Pendapatan Asli Daerah yang menunjukkan nilai yang jauh lebih kecil dengan angka sebesar Rp 77.696.581.972,00 miliar di tahun 2014 dengan peningkatan yang terjadi hingga 2023 menjadi Rp 320.986.119.666,00

miliar. Ketergantungan tinggi pada transfer pusat dapat menjadi isu yang perlu diatasi dalam mencapai kemandirian fiskal.

Sedangkan disisi lain, belanja daerah menunjukkan data sebesar Rp 1.211.113.814.413,00 miliar pada tahun 2014 dan terus terjadi tren peningkatan terutama di tahun 2023 menjadi Rp 2.051.989.153.844,00 miliar. Namun, terdapat ketimpangan pada alokasi belanja daerah yang didominasi oleh belanja pegawai dibandingkan dengan belanja modal yang bersifat produktif. Ketimpangan ini justru dapat mengindikasikan adanya ketidakefektifan penggunaan belanja daerah sehingga tidak dapat mendukung pertumbuhan ekonomi mengingat belanja pegawai hanya digunakan untuk administrasi dan gaji pegawai, bukan mendukung Pembangunan infrastruktur atau investasi yang dapat mendorong produktivitas ekonomi. Sehingga terdapat ketidaksesuaian pada teori pertumbuhan ekonomi yang menyebutkan bahwa alokasi belanja pada bidang produktivitas sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah.

Grafik 1. 4 Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Sampang 2014-2023



Sumber: DPJK Kemenkeu (data diolah)

Berdasarkan data alokasi dana pada belanja daerah Kabupaten Sampang, belanja pegawai mendominasi dan meningkat tiap tahunnya hingga mencapai Rp 726,13 miliar pada tahun 2023. Alokasi dana yang besar ini menunjukkan bahwa anggaran lebih difokuskan pada pengeluaran rutin dibandingkan dengan kebutuhan pertumbuhan dan Pembangunan. Sedangkan, belanja modal tergolong fluktuatif dan mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2023 menjadi Rp 274,86 miliar. Fenomena ini menunjukkan bahwa alokasi dana untuk anggaran belanja yang bersifat produktif masih belum maksimal sehingga potensi pertumbuhan ekonomi melalui Pembangunan dan pengembangan daerah masih terhambat. Penggunaan belanja daerah yang efektif dan efisien seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, menurut Abimanyu (2005)

anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Deviani, 2016).

Dari fenomena ini, timbul pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan dana perimbangan dan belanja daerah di Kabupaten Sampang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi yang kecil pada PAD serta ketergantungan tinggi pada dana perimbangan, maka perlu kajian lebih lanjut untuk menganalisis alokasi belanjadaerah sudah sesuai dengan tujuan dalam meningkatkan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

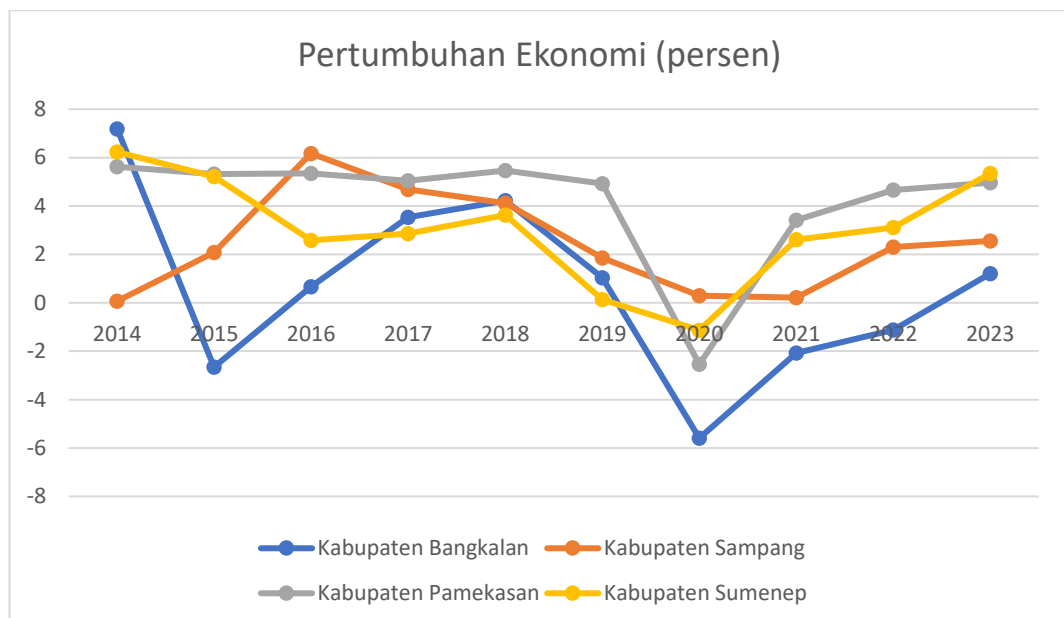
Menurut Renaldi (2016) Tingkat ketergantungan daerah melalui transfer pemerintah pusat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerahnya. Daerah dengan PAD tinggi maka akan mengurangi transfer pemerintah pusat dengan kata lain transfer pemerintah daerah juga akan rendah. Sedangkan daerah dengan PAD rendah cenderung akan membutuhkan transfer pemerintah pusat lebih tinggi. Hal ini yang juga terjadi di Kabupaten Sampang dengan PAD rendah sehingga untuk menciptakan keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masih memerlukan transfer pemerintah pusat yang tinggi. Kabupaten Sampang menjadi daerah dengan PAD terendah jika dibandingkan dengan tiga kabupaten lain di Pulau Madura yakni Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Pamekasan.

Bahkan, Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sampang berada pada posisi 38 dari 38 Kabupaten atau Kota di Jawa Timur pada tahun 2023 yakni hanya sebesar Rp191,97 Miliar. Disusul oleh Kabupaten Pacitan sebesar Rp199,08 Miliar dan Kabupaten Bondowoso dengan nilai Rp219,83 Miliar.

Hal ini semakin memberikan urgensi sebagai daerah yang masih minim dalam menghasikan kemampuan dalam Pendapatan Asli Daerahnya.

Kabupaten sampang menjadi salah satu kabupaten di Madura dengan tren pertumbuhan ekonomi yang stabil pada lima tahun terakhir meski sempat terdampak pandemi Covid-19 dan menyebabkan penurunan. Namun, Kabupaten Sampang masih dapat menunjukkan stabilitas kemampuan daerah untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi.

Grafik 1 5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep Periode 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Kabupaten Bangkalan menunjukkan laju pertumbuhan yang fluktuatif dan penurunan yang drastis pada tahun 2020 karena krisis Covid-19. Kabupaten Pamekasan dan Sumenep menunjukkan pertumbuhan yang tinggi signifikan, namun Kabupaten Sampang menunjukkan moderasi sehingga tidak terjadi penurunan serta kenaikan yang ekstrem seperti daerah lainnya.

Sebagai daerah yang masih memiliki ketergantungan fiskal pada Dana Perimbangan, penelitian pada Kabupaten Sampang dapat memberikan Gambaran penggunaan alokasi dana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi telah efektif, atau masih terdapat ruang untuk melakukan optimalisasi terhadap belanja daerah yang lebih produktif. Beberapa sektor di Kabupaten Sampang masih belum dapat memberikan kontribusi maksimal yang dapat menjadi potensi sebagai indikator penghasil pendapatan asli daerah, sehingga pemerintah daerah perlu menggali kekayaan yang dapat berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019)”. Diperoleh hasil bahwa variabel PAD, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil dapat mempengaruhi belanja daerah secara signifikan, sedangkan pada variabel pertumbuhan ekonomi hanya PAD dan Belanja Daerah yang signifikan berpengaruh. Serta belanja daerah dapat menjadi variabel penghubung antara variabel PAD, DAK, DAU, dan DBH terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Monica & Sa’roni 2022). Hal ini selaras dengan topik serta tema penelitian yang akan diteliti dengan kebaruan objek yakni Kabupaten Sampang dengan penilaian karakter objek yang hampir sama dalam segi Pendapatan Asli Daerah yang belum mampu mencukupi pengeluaran daerah sehingga masih memiliki ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Studi yang dilakukan

pada Kabupaten Sampang dapat memberikan Gambaran yang lebih spesifik yang belum diungkap dalam penelitian sebelumnya, terutama bagaimana karakteristik PAD dan Belanja Daerah pada wilayah yang lebih kecil dengan potensi ekonomi lokal yang berbeda

Dengan hipotesis peningkatan pada PAD dan Dana Perimbangan dapat memenuhi kebutuhan pemerintah daerah untuk memenuhi belanja daerah. Alokasi belanja daerah yang tepat pada struktur produktivitas daerah dalam meningkatkan fasilitas publik dan ekonomi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, penggunaan belanja daerah yang efektif dapat menjadi jembatan antara PAD dan Dana Perimbangan sebagai penentu pengaruh pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam dengan mengangkat judul **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sampang (Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan., maka rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara langsung terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Sampang
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh secara langsung terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Sampang

3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sampang melalui Belanja Daerah sebagai variabel intervenig
4. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh secara tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sampang melalui Belanja Daerah sebagai variabel intervening

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk melakukan analisis adanya pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Sampang
2. Untuk melakukan analisis adanya pengaruh langsung Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sampang
3. Untuk melakukan analisis pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sampang melalui Belanja Daerah sebagai variabel intervening
4. Untuk melakukan analisis pengaruh tidak langsung Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sampang melalui Belanja Daerah sebagai variabel intervening

5. Ruang Lingkup Penelitian

Guna menghindari adanya penelitian yang meluas, sehingga diberlakukan batasan yang hanya memuat permasalahan yang mencakup data time series Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan

Pertumbuhan Ekonomi dengan objek penelitian di Kabupaten Sampang yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang dan DJPK Kementerian Keuangan.

6. Manfaat Penelitian

Temuan dalam penelitian ini dimaksudkan agar mampu memberi manfaat yang selaras dengan konteks permasalahan yang akan dikaji, diantaranya ialah:

1. Bagi Pemerintah, temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk ide evaluasi dan tinjauan untuk menggali potensi daerahnya serta dapat mengembangkan sumber Pendapatan Daerah dengan memaksimalkan sektor potensial yang ada di suatu daerah sehingga ekonomi mengalami peningkatan dan juga berdampak pada kemandirian keuangan dalam memenuhi setiap pengeluaran daerahnya. Diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana yang berasal dari transfer pusat guna menunjang pembiayaan belanja daerah untuk kemajuan sarana prasarana penunjang pertumbuhan baik dari segi ekonomi maupun non ekonomi guna mendukung produktivitas.
2. Bagi pembaca, diharapkan dapat memberikan gambaran terkait pertumbuhan ekonomi dan keuangan daerah Kabupaten Sampang menjadi sumber referensi serta perbandingan bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dengan membahas topik serta permasalahan serupa.